

PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

**Yusa Djuyandi¹, Mustabsyirotul Ummah Mustofa², Luthfi H. Husin³, Moch
Nurdi Iriansyah⁴, Arif Fajarudin⁵**

¹²³Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran,

Koresponden Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.6613

ABSTRAK

Indonesia memiliki doktrin sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata) yang salah satunya dilihat dari dukungan masyarakat sipil dalam pertahanan negara. Dukungan masyarakat sipil terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional dapat dilihat dari sudut pandang hubungan sipil-militer di wilayah perbatasan. Komunikasi sosial TNI dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya hubungan sipil-militer yang harmonis dan kuat di wilayah perbatasan, khususnya dalam hal ini di wilayah Natuna, Kepulauan Riau sebagai kawasan terluar perbatasan negara. Untuk meningkatkan hubungan yang sinergis antara sipil-militer dalam menghadapi ancaman-ancaman di wilayah perbatasan dibutuhkan kerjasama berbagai stakeholder di wilayah perbatasan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penjagaan kedaulatan perbatasan. Selain itu, TNI juga perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik kepada masyarakat sipil sebagai komponen pendukung pertahanan nasional di wilayah perbatasan. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerjasama antara TNI dan masyarakat secara berkesinambungan di wilayah perbatasan Indonesia agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat di perbatasan sehingga mampu berkontribusi dalam upaya memperkuat pertahanan negara.

Kata kunci: *Sosialisasi; Hubungan sipil-militer; Natuna; Perbatasan Indonesia, Pertahanan Negara*

ABSTRACT

Indonesia has a doctrine of the universal people's defense system (Sishanrata), which one of it can be seen from the support of civil society in national defense. Civil society's support for national defense and national security can be seen from the perspective of civil-military relations in border areas. TNI and civil society communication in strengthening national resilience seeks to provide a broader understanding of the importance of harmonious and strong civil-military relations in border areas, especially in this case in the Natuna region, Riau Islands as the outermost area of the state border. In order to improve synergistic relations between civil-military in dealing with threats in border areas, cooperation between various stakeholders in border areas is required. Thus, the civil society is expected to have an active role in guarding border sovereignty. In addition, the TNI also needs to have good social communication skills with civil society as a supporting component of national defense in border areas. It is necessary to carry

out collaboration and cooperation between the TNI and the civil society on an ongoing basis in Indonesia's border areas so that they can provide benefits to the people at the border so that they are able to contribute to efforts to strengthen national defense.

Keywords: *Socialization; Civil-military relations; Natunas; Indonesian Border, National Defense*

PENDAHULUAN

Pertahanan adalah unsur penting untuk menjaga kedaulatan sebuah negara, terutama bagaimana agar negara tidak kehilangan wilayahnya dari adanya berbagai bentuk ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh negara lain. Setidaknya terdapat beberapa contoh kasus dari lepasnya wilayah sebuah negara yang jatuh ke tangan negara lain, baik melalui proses agresi atau nonagresi, sebagaimana lepasnya Krimea dari Ukraina ke Rusia, serta Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia. Berkaca kepada fenomena ini maka kemampuan sebuah negara dalam menjaga kedaulatannya melalui penguatan unsur pertahanan menjadi hal penting, sebab bagi negara kehilangan sebagian dari wilayahnya merupakan sebuah kerugian besar atas kepentingannya nasionalnya.

Dalam upaya mewujudkan pertahanan negara, Indonesia telah sejak masa kemerdekaan menetapkan suatu doktrin pertahanan yang dinamakan dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), doktrin ini diterapkan untuk menerapkan sistem pertahanan yang dihadapkan pada ancaman non-militer atau dapat digunakan sebagai pendukung pertahanan militer (Suryokusumo et al., 2016).

Potensi ancaman militer atas wilayah Natuna berkembang seiring dengan semakin memanasnya situasi politik di wilayah Laut China Selatan, dimana klaim sepihak China atas wilayah Laut China Selatan tidak hanya telah menyinggung kedaulatan

Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina, tetapi juga Indonesia. Dalam kebijakan nine dash line yang diimplementasikan oleh China, didalamnya ada klaim China atas wilayah Laut Natuna Utara (Adhi, 2021; Idris, 2021). Klaim China atas Laut China Selatan juga telah memicu reaksi dari negara-negara yang menerapkan prinsip freedom of navigation dan turut memiliki kepentingan atas Laut China Selatan, yaitu aliansi Australia, United Kingdom dan United States (AUKUS), bahkan dalam perkembangannya turut mendorong adanya unjuk kekuatan militer yang mengarah pada potensi konflik militer di kawasan ini (Cardenas, 2020).

Sedangkan potensi ancaman non-militer di Natuna muncul dari adanya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari Vietnam, Thailand dan China, tidak jarang nelayan asing tersebut melakukan juga melakukan intimidasi terhadap nelayan Indonesia. Disayangkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh nelayan asing itu dilindungi oleh kapal patroli penjaga pantainya, seperti yang pernah dilakukan oleh Vietnam dan China, yang berarti negara-negara tersebut membenarkan tindakan illegal yang dilakukan para nelayannya untuk menangkap ikan di wilayah Laut Natuna Utara di Indonesia (Fazri, 2021; Firmansyah, 2021; Ogen & Suyanto, 2021).

Dengan merujuk kepada permasalahan tersebut, maka pertahanan negara untuk melindungi wilayah Natuna sebagai Kawasan terluar

perbatasan negara dilakukan dengan mengkombinasikan sistem pertahanan militer dan non-militer. Implementasi sistem pertahanan militer dan non-militer merupakan suatu sistem pertahanan yang sejalan dengan doktrin pertahanan Indonesia, yakni sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata). Implementasi Sishanrata selain mengandalkan militer sebagai kekuatan utama pertahanan juga mendorong adanya partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat sipil, dikarenakan terdapat adanya dukungan masyarakat sipil dalam pertahanan negara maka analisis atas Sishanrata juga dapat ditelaah dari sudut pandang konsep hubungan sipil-militer.

Dimensi pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh hadirnya kekuatan militer dalam menjaga wilayah yang disengketakan tetapi juga ditentukan oleh adanya kekuatan non militer dengan pendekatan yang bersifat lunak. Konsep pertahanan dengan pendekatan lunak memperhatikan bagaimana kekuatan negara yang tidak hanya dilihat pada kemampuan militernya, tetapi juga pada kekuatan budaya, sistem politik, keterbukaan informasi bagi masyarakat, pendidikan, ideologi, model ekonomi, dan daya saing ekonomi (Wang & Lu, 2008). Kemampuan negara dalam bertahan amat diperlukan untuk dapat memenangkan “peperangan”, pertahanan negara menurut Nye (2008) sangat ditentukan oleh strategi smart power yang menggabungkan antara sumber-sumber *hard power* dan *soft power*, yang menarik dari konsep ini adalah bahwa *soft power* yang dilakukan melalui diplomasi publik juga membutuhkan adanya masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan (Nye, 2008). Menelisik pada konsep pertahanan itu sendiri, terutama bila merujuk pada pandangan perspektif lampau, maka

pertahanan atau yang juga disebut sebagai self-defence adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer sebagai upaya untuk melindungi negara dari penderitaan yang disebabkan oleh serangan militer, konsep pertahanan ini berkenaan dengan *Caroline doctrine of anticipatory self-defence* (Reisman & Armstrong, 2006). Akan tetapi pasca perang dunia kedua, dimana kemudian terjadi sebuah revolusi dalam peperangan, maka pertahanan negara sebagai upaya menangkal serangan dan ancaman yang datangnya dari luar (*external threat*) tidak lagi hanya dapat dilihat dari ancaman militer, sebagaimana kemudian ancaman ekonomi dari luar negara juga menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan, seperti halnya (Schiff, 2009).

Meskipun terdapat dua paradigma yang berbeda tentang pertahanan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, namun pada dasarnya pertahanan tetap dipersepsikan sebagai suatu daya tangkal untuk menahan adanya serangan eksternal, dan tujuan dari pertahanan itu sendiri adalah untuk melindungi negara serta memberi masyarakat jaminan kebebasan dari rasa (Djuyandi et al., 2018; la Ode, 2006). Pertahanan sebagai suatu usaha untuk melindungi negara dari adanya ancaman yang berasal dari eksternal tidak hanya dapat diimplementasikan dengan membangun atau memperkuat kekuatan militer, di sisi lain kekuatan non-militer juga perlu dibangun yang diantaranya adalah dengan melibatkan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Sisi menarik dari teori ini adalah bahwa kemampuan kelompok non-militer dalam pertahanan negara diantaranya juga dapat dilakukan dengan mendorong kemampuan masyarakat sipil di sector diplomasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan moral

(Bunga & Tukan, 2019). Apa yang kemudian dituangkan dalam teori tersebut menunjukkan bahwa konsep pertahanan negara telah mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan, tidak lagi hanya melihat ancaman dan kekuatan militer sebagai satu-satunya yang hadir dalam dimensi pertahanan, tetapi juga melihat adanya dimensi lain di luar ancaman dan kekuatan militer.

Perbincangan mengenai konsep hubungan sipil-militer menggambarkan adanya hubungan antara organisasi militer dan masyarakat sipil, organisasi militer dan birokrasi pemerintah lainnya, serta pemimpin dalam otoritas politik sipil dan militer (Brooks, 2019). Meski pembahasan tentang konsep hubungan sipil-militer banyak terfokus pada pentingnya menjaga supremasi sipil dan kontrol sipil atas militer untuk mendorong profesionalisme militer (Burk, 2002; Gaub, 2016; Herspring, 2005), namun jangan sampai hubungan tersebut menempatkan jarak tertentu yang terlalu jauh sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan bersama dalam pertahanan negara, sebab pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama yang membutuhkan kerja sama (dan bukan hanya kontrol) dalam domain strategis, organisasi, operasional dan sosial (Gaub, 2016).

Gambaran tentang hubungan sipil-militer yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi sipil dan militer dalam mempersiapkan kekuatan pertahanan negara juga pernah dikaji atas Singapura, dimana dalam masa damai kebijakan otoritas politik sipil salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat dipersiapkan untuk memperkuat pertahanan (Laksmiana, 2017). Kajian lainnya juga pernah di kaji atas Amerika Serikat, yakni hubungan sipil-militer akan mendorong adanya efektivitas

militer melalui keterlibatan kelompok dan otoritas politik sipil dalam memberikan masukan atas strategi perang (Blankshain, 2020).

Untuk mewujudkan adanya hubungan sipil – militer yang baik agar tercapai terbangunnya sistem pertahanan rakyat semesta untuk memperkuat pertahanan negara di wilayah perbatasan negara, diperlukan adanya komunikasi sosial TNI dan masyarakat. Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas maka diperlukan kolaborasi bersama yang ditujukan untuk memberikan dan membangun pemahaman akan pentingnya komunikasi sosial TNI dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional.

METODE

Artikel ini disusun berdasarkan dua kegiatan yang dilakukan yakni pengabdian kepada masyarakat dan penelitian. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan bentuk pemberian materi atau seminar kepada masyarakat mengenai upaya menjaga pertahanan di wilayah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal penelitian, proses pelatihan tersebut menjadi wadah untuk mengumpulkan data lapangan yang bersifat observasi sehingga proses pemberdayaan ini sekaligus memberikan gambaran empiris dari situasi masyarakat di perbatasan Indonesia.

Materi yang akan diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia meliputi materi komunikasi sosial TNI dan Masyarakat, ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam pembangunan. Pemberian materi ini diharapkan menjadi upaya kontribusi penelitian ini dalam permasalahan masyarakat di perbatasan khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi sekaligus menjadi cara untuk

mengedukasi masyarakat bahwa kedaulatan dan pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama semua elemen bangsa.

Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan. Khalayak sasaran terdiri dari masyarakat umum dan pemerintah daerah setempat.

Rangkaian kegiatan yang direncanakan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang sudah dilakukan dalam proses penelitian turut membantu dalam tahapan kegiatan untuk pengabdian kepada masyarakat. Berikut merupakan beberapa proses yang sudah dilakukan:

1. Penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen pendukung lain sebagai langkah awal aktivitas pengumpulan data yang menjadi bahan untuk penyampaian materi
2. Penyusunan instrument berupa daftar pertanyaan wawancara dan theme of reference untuk kegiatan FGD
3. Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait pertahanan di perbatasan Indonesia di Natuna yang juga menjadi basis data untuk menyiapkan materi pengabdian kepada masyarakat
4. Penyusunan materi pelatihan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Tahapan kegiatan yang sudah dilakukan bersifat online atau daring. Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipertimbangkan untuk menggunakan skema *hybrid* dengan memperhatikan bahwa kondisi masyarakat di wilayah perbatasan yang belum terjangkau saluran telekomunikasi yang memadai. Meskipun demikian, peneliti tetap akan memperhatikan protokol kesehatan

untuk penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat dalam Hubungan Sipil - Militer

Terdapat beberapa konsep arus utama di dalam memahami konsep pemberdayaan masyarakat. Untuk membantu itu, secara umum dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dengan struktur sosial dari masyarakat itu sendiri (Jimu, 2008). Sebagaimana dipahami oleh Koentjaraningrat (2009), masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi satu sama lain atas ikatan satu identitas yang sama. Karenanya, konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari modal sosial dan juga struktur sosial yang ada dari masyarakat itu sendiri, sehingga peningkatan kemampuan dan pemulihan kondisi, yang utamanya direkayasa oleh aktor eksternal dari suatu masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi struktur sosial di internal masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Untuk itu, pemberdayaan harus melibatkan utamanya aktor lokal sebagai pihak yang aktif ketimbang yang pasif. Keterjebakan konsep pemberdayaan yang jamak dilakukan hanya berkuat dalam metode top-down yang tidak sensitive dengan realisme yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal, hal terpenting dalam pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi berdaya atau berkuasa atas kondisi yang dialami, bukan hanya terlihat pura-pura berdaya tetapi masih bergantung pada aktor-aktor eksternal dari masyarakat tersebut. Untuk melakukan ini, maka penting untuk melihat pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kekuasaan, di mana

masyarakat dibuat berkuasa atas kondisi dan masalah yang dihadapinya sendiri sehingga proses pemberdayaan tidak hanya terkesan sebagai bagian dari proyek atau rutinitas belaka, tetapi juga sebagai proses pembelajaran transformatif di dalam internal masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat untuk membentuk sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata) yang memadukan unsur militer sebagai kekuatan utama pertahanan dan unsur masyarakat sipil sebagai kekuatan pendukung, dapat ditelaah dari konsep hubungan sipil-militer. Perbincangan mengenai konsep hubungan sipil-militer menggambarkan adanya hubungan antara organisasi militer dan masyarakat sipil, organisasi militer dan birokrasi pemerintah lainnya, serta pemimpin dalam otoritas politik sipil dan militer (Brooks, 2019). Meski pembahasan tentang konsep hubungan sipil-militer banyak terfokus pada pentingnya menjaga supremasi sipil dan kontrol sipil atas militer untuk mendorong profesionalisme militer (Burk, 2002; Gaub, 2016; Herspring, 2005), namun jangan sampai hubungan tersebut menempatkan jarak tertentu yang terlalu jauh sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan bersama dalam pertahanan negara, sebab pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama yang membutuhkan kerja sama (dan bukan hanya kontrol) dalam domain strategis, organisasi, operasional dan sosial (Gaub, 2016).

Posisi Natuna dan Proses Sinergi antar pihak

Posisi Natuna terletak sebagai kepulauan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Posisi Natuna tersebut berada di Laut China Selatan, yang mana menjadikan keberadaan konflik kedaulatan antara Indonesia dan China.

Ranai, merupakan Ibu Kota dari wilayah tersebut, dan wilayah tersebut terdiri dari tujuh pulau dengan besar wilayah sebesar 141.901 Km². Wilayah ini dinilai kaya akan kekayaan alamnya, seperti kekayaan laut hingga gas alam yang dinilai terbesar di Asia Pasifik dan bahkan di dunia (Tampi, 2017).

Wilayah ZEE Indonesia yang berlokasi di perairan Kepulauan Natuna terkenal dengan sumber daya alamnya yang kaya akan perikanan. Sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, Laut Natuna Utara selalu menjadi kawasan perairan laut yang diperebutkan untuk kepentingan banyak hal, seperti klaim China atas Laut China Selatan yang meliputi ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Laut China Selatan selalu menjadi lokasi favorit bagi kapal ikan asing (KIA) untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara illegal. Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Laut China Selatan dan mengalami sengketa dengan China dan beberapa negara di ASEAN, dengan klaim bahwa area tersebut merupakan traditional fishing ground China. Sudah banyak kasus setidaknnya sembilan praktik illegal fishing oleh nelayan China di area ZEE. Hal akan sangat berdampak kepada faktor ekonomi dan politik internasional Indonesia (Riska, 2017).

Dengan kondisi wilayah Natuna tersebut, diperlukan proses sinergi antara TNI, Polri, dan Bakamla bersama dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dalam konteks upaya untuk menjaga keamanan wilayah laut, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) melalui Pasal 59 (3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla dibentuk guna

menegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, termasuk juga menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Ketika melakukan aktivitas patroli di wilayah perbatasan Natuna, TNI AL bersinergi dengan Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengawasi dari aktivitas ilegal. Selain itu, dengan mengupayakan sinergi pengamanan Laut Natuna, TNI AL dan Bakamla melakukan kegiatan latihan bersama dengan armada Bakamla dan TNI AL yang meliputi manuver taktis, formasi, hingga komunikasi taktis ketika di laut percaya (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 2021). Untuk kasus-kasus tertentu seperti adanya laporan aktivitas kapal asing yang mondar-mandir ataupun melanggar batas wilayah perairan Indonesia, diperlukan koordinasi dengan Bakamla Pusat, KKP, dan TNI AL untuk memutuskan tindakan. Namun alur koordinasi dapat dipersingkat apabila laporan pelanggaran berada pada tahap yang darurat dan memerlukan tindakan segera.



Gambar 1. Pertemuan bersama Bakamla Natuna

Berdasarkan keterangan dari Kepala Pos Pemantau Badan Keamanan Laut Natuna atau Bakamla, tugas mereka merupakan tugas yang berat karena Natuna merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilewati kapal

dari berbagai negara. Bakamla mengawasi wilayah ini dari ancaman, seperti apabila ada dugaan kapal asing yang berkelintaran masuk ke dalam teritori.



Gambar 2. Pertemuan bersama Bakamla Natuna

Bakamla menyebutkan bahwa pemantauan dilakukan dengan menggunakan sistem peralatan seperti radar dan AIS (*Automatic Identification System*) dengan kategori biasa yang umumnya mematikan AIS hingga yang urgent yang pergerakan kapal asing ketika diamati tidak biasa.



Gambar 3. Pertemuan bersama Bakamla Natuna

Bakamla beranggapan bahwa kesulitan tim monitoring adalah saat kapal asing menggunakan AIS dan berkeliaran di laut kandas kontinen yang merupakan area abu-abu, sementara yang dapat dijangkau oleh radar hanyalah mencapai 200 mil atau ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*). Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan integrasi dari laut, udara, dan satelit. Meskipun sudah muncul regulasi

di Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan keamanan dan keselamatan perairan, namun hal itu baru hanya untuk integrasi dan belum mencakup integrasi alat.



Gambar 4. Pertemuan bersama Danlanal Natuna

Menurut Komandan Pangkalan Laut (Danlanal) Natuna, terdapat beberapa kasus yang termasuk ancaman yang terjadi di Natuna. Permasalahan kedaulatan negara adalah hal yang tidak bisa ditolerir, sehingga apabila ada kapal ikan asing yang memasuki wilayah ZEE akan ditangkap. Tugas pokok Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai adalah mendukung segala sesuatu yang melaksanakan operasi seperti KRI, pesawat dan marinir.



Gambar 5. Pertemuan bersama Danlanal Natuna

Lanal menyebutkan bahwa kapal asing yang melanggar masuk ke wilayah

adalah sengaja karena lebih banyak ikan dan bahkan dikawal oleh post guard mereka. Apabila terdapat tangkapan dari Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), maka langsung diberi notifikasi kepada Kedutaan Besar Negara asal-nya. Nahkoda kapal yang tertangkap akan dijadikan tersangka dan dikenakan UU No. 6 mengenai Perikanan dan Cipta Kerja. Sisanya yang non-yustisi akan dikoordinasikan dengan imigrasi yang bertandatangan di bawah pengawasan Lanal. Setelah diserahkan, tahap dua, tersangka dengan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan yang non-yustisi dikoordinasikan dengan imigrasi dan dideportasi.



Gambar 6. Pertemuan bersama Dandim Natuna

Kemudian dari Komandan Distrik Militer (Dandim) Natuna memberi keterangan mengenai kondisi ancaman di wilayah Natuna. Tindakan kriminal di wilayah Natuna dinilai tidak sekompleks di daerah lain dan kondisinya cukup kondusif. Yang menjadi permasalahan adalah Natuna dijadikan ikon pertahanan keamanan yang justru membuat selalu waspada, sehingga apabila ada permasalahan dengan negara lain tidak langsung mengerahkan militer, namun diselesaikan melalui aspek sosial terlebih dahulu.



Gambar 7. Pertemuan bersama Bupati Natuna

Stakeholder lain selain militer yang memiliki peran pertahanan di wilayah perbatasan adalah pemerintah daerah. Kabupaten Natunan memiliki peran dan fungsi yang diatur berdasarkan Undang-undang otonomi daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan di wilayah terkhusus Natuna sebagai wilayah perbatasan. Bupati Natuna menginginkan Natuna dilihat tidak sekedar bersifat militer saja, yang mana cenderung daerah beresiko tidak aman, namun dijadikan tempat wisata yaitu atau tempat pengalengan ikan



Gambar 8. Pertemuan bersama Bupati Natuna

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya untuk memperkuat sinergi antara Lembaga, Pemerintah daerah Kabupaten Natuna menerima dengan senang hati kehadiran Prajurit TNI yang rutin berpatroli untuk menjaga wilayah perbatasan. Begitu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Natuna kerap menyelenggarakan berbagai

kegiatan edukatif guna mengedukasi masyarakat, terutama kelompok pemuda dan organisasi masyarakat. Edukasi tersebut berguna untuk menunjang upaya-upaya pertahanan yang meliputi sosialisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Dengan begitu, upaya mewujudkan sinergisitas antara pihak dilakukan tidak hanya melalui ranah militer, namun juga ranah non-militer seperti melalui sosialisasi dan edukasi tersebut.

Komunikasi Sosial (Komsos) TNI kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, Komunikasi Sosial (Komsos) merupakan strategi untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan perannya dalam menjaga ketahanan wilayah (bisa dalam bentuk bela negara). Komsos adalah proses komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan pendekatan persuasive. Komsos gencar dilaksanakan oleh TNI kepada masyarakat. Seperti pada bulan September tahun 2020, Komandan Distrik Militer (Kodim) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) selaku TNI di wilayah Natuna melakukan Komsos yang berguna mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah Natuna dari masyarakat. Selain itu, dilaksanakannya Komsos juga menjadi upaya untuk menjalin hubungan baik antara TNI dan berbagai lapisan masyarakat (Lintaskepri, 2020)



Gambar 9. Pertemuan bersama beberapa perwakilan dari beberapa lapisan masyarakat

Melalui *Forum Group Discussion* bersama golongan masyarakat yang melibatkan Perwakilan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Natuna, Camat Bunguran Timur, Wakil Komandan Pasukan Khas Pangkalan Udara Ranai – Natuna, Wakil Kapolres Natuna, Ketua BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Ketua dan Wakil Ketua KNPI Kabupaten Natuna, serta Organisasi Kemasyarakatan Bela Negara, disebutkan bahwa nelayan hampir melaut hampir 50 mil, sehingga sudah membaur dengan nelayan asing. Meskipun begitu, kapal asing cenderung tidak memprovokasi nelayan lokal dan justru berhubungan baik dengan mereka. Kapal asing lebih memprovokasi kapal *Case Squad* atau kapal yang dari pemerintahan. Hubungan nelayan lokal pun tidak begitu baik juga dengan *Coast Guard* asing karena mereka yang melindungi kapal mereka



Gambar 10. Pertemuan bersama beberapa perwakilan dari beberapa lapisan masyarakat

Dengan berita yang beredar di media, berita yang beredar justru tidak sesuai dengan keadaan Natuna sebenarnya, dimana keadaan sebenarnya adalah aman namun media dengan hiperbola menyebarluaskan bahwa Natuna adalah wilayah yang beresiko. Rasa tidak aman dari warga justru dikarenakan berita yang beredar sehingga menjadi terjaga

secara psikologis. Ancaman yang lebih dirasakan adalah justru bukan ancaman militer, namun ancaman non-militer berupa pergeseran budaya, dimana nilai gotong royong di masyarakat berkurang dan nilai kedaerahan sudah tergerus oleh globalisasi.



Gambar 11. Pertemuan bersama beberapa perwakilan dari beberapa lapisan masyarakat

Komsos yang dilaksanakan secara rutin oleh TNI kepada berbagai lapisan masyarakat sejatinya memerlukan perencanaan yang implementasinya dilakukan secara berkesinambungan. Selain guna menciptakan hubungan harmonis antara berbagai pihak, Komsos yang dilaksanakan memerlukan strategi yang menjadikan pesan dan tujuan tersampaikan dengan baik. Tidak hanya ancaman militer, namun seluruh elemen harus mengupayakan pertahanan dan sifat kebangsaan untuk menghadapi ancaman non-militer di Natuna.

SIMPULAN

Permasalahan di wilayah perbatasan merupakan persoalan yang cukup kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan pertahanan wilayah tetapi juga bersinggungan erat dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupaya mengedukasi masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan tentang pentingnya menjaga kohesi sosial dengan mengetahui peran serta

setiap elemen masyarakat selain TNI yang menjaga wilayah perbatasan itu sendiri.

Materi yang akan diberikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia meliputi materi komunikasi sosial TNI dan Masyarakat, ketahanan nasional, wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam pembangunan. Pemberian materi ini diharapkan menjadi upaya kontribusi penelitian ini dalam permasalahan masyarakat di perbatasan khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi sekaligus menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat bahwa kedaulatan dan pertahanan negara adalah tanggungjawab bersama semua elemen bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan pendanaan dan perizinannya. Ucapan terima kasih kami juga untuk kontak person yang berada di wilayah perbatasan Indonesia di Natuna termasuk didalamnya menghubungi pemerintah daerah setempat,

DAFTAR PUSTAKA

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2021, January 17). *Sinergi pengamanan Laut Natuna, TNI AL dan Bakamla laksanakan latihan bersama*. Bakamla.Go.Id. https://bakamla.go.id/publication/detail_news/sinergi-pengamanan-laut-natuna-tni-al-dan-bakamla-laksanakan-latihan-bersama

Bunga, G. A., & Tukan, E. N. B. (2019). LEGAL IMPACT OF STATE DEFENSE ON INDONESIAN CITIZEN IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PRESPECTIVE. *Yustisia*, 8(2),

164–185.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

- Djuyandi, Y., Putra, K., & Faozan, H. (2018). Political Communication Between the House of Representatives and the Ministry of Defense in Discussing the Republic of Indonesia State Defense Policy. *Central European Journal of International & Security Studies*, 12(4), 82–95. <http://www.cejiss.org/issue-detail/political-communication-between-the-house-ofrepresentatives-and-the-ministry-of-defense-in-discussing-the-republic-of-indonesia-state-defensepolicy>
- Jimu, I. M. (2008). Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa Development*, XXXIII(2), 23–35.
- Koentjaraningrat. (2009). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Longman.
- la Ode, M. D. (2006). *Peran Militer dalam Ketahanan Nasional; Studi Kasus Bidang Hankam di Indonesia Tahun 1967 – 2000*. Pustaka Sinar Harapan. .
- Lintaskepri. (2020). *Arahan Dandim Natuna, Dalam Komsos Babinsa Harus Senyum, Tegur dan Sapa dengan Ramah*. Lintaskepri.Com.
- Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Reisman, W. M., & Armstrong, A. (2006). The Past and Future of the Claim of Preemptive Self-Defense. *The American Journal of International Law*, 100(3), 525–

550.
<https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/pastand-future-of-the-claim-of-preemptive-selfdefense/896789EC008EDE427A5E8EA3A66C1ECD>
- Riska, E. (2017). *DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH NELAYAN CHINA DI ZEEI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA*.
- Schiff, R. L. (2009). *The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil-Military Relations*. Routledge.
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23, 1–16.
- Wang, H., & Lu, Y. C. (2008). The Conception of Soft Power and its Policy Implications: a comparative study of China and Taiwan. *Journal of Contemporary China*, 17(56), 425–447.